

Donald Trump, *America First*, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya?

Helsa Eka Putri

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: helsieci@gmail.com

Aspin Nur Arifin Rivai

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: askaspin@gmail.com

Abstrak

Terpilihnya Donald Trump di satu sisi menjadi primadona bagi basis politik ultra kanan atau kadang disebut the loser of globalization, di sisi lain sebagai ancaman bagi pendukung globalisasi khususnya mereka (baik negara, kelompok pebisnis, dan masyarakat transnasional) yang khawatir atas menguatnya fenomena deglobalisasi. Fenomena Trump dan deglobalisasi menjadi perhatian artikel ini, dengan mengajukan pertanyaan kunci yaitu: mengapa di tengah globalisasi yang berlangsung, kebijakan luar negeri Trump justru menempuh pendekatan ekonomi politik proteksionis? Tulisan ini pada dasarnya menguji kembali relasi antar negara dan globalisasi dengan temuan bahwa keterpilihan Trump merupakan perluasan tren deglobalisasi yang sebelumnya berlangsung pasca Krisis Finansial Global 2008. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deduktif deskriptif. Data akan berbentuk data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Trump yang cenderung tertutup dalam kerjasama ekonomi-politik merupakan strategi rebalancing terhadap lawan utamanya yaitu China. Tulisan ini kemudian memprediksikan bahwa kebijakan ekonomi Trump dapat berkontribusi pada AS sebagai negara superior yang semakin defisit. China lantas menjadi penyeimbang poros globalisasi (multilateral approach) disaat AS memilih proteksionis.

Kata kunci: America First, Deglobalisasi, Globalisasi, Krisis Finansial Global (KFG)

Abstract

The election of Donald Trump on the one hand is a prima donna for the ultra right political base or sometimes called the loser of globalization, on the other hand as a threat to supporters of globalization especially those who are concerned about the strengthening of the deglobalisation phenomenon (countries, business groups and transnational communities). Trump's phenomenon and deglobalisation are of concern to this article, by asking key questions, namely: why in the midst of the ongoing globalization, Trump's foreign policy has taken the approach of a protectionist political economy? This paper basically reexamines relations between countries and globalization with the finding that Trump's electability is an expansion of the previous globalization trend after the 2008 Global Financial Crisis. This paper uses qualitative methods with descriptive-deductive pattern. Data will be presented as secondary and primer. The results of this research show that Trump's policy which tends leaning to isolationism from political-economic cooperation is a rebalancing strategy towards its main opponents namely China. This paper then predicts that Trump's economic policies can contribute to the US as a superior country that is increasingly deficit. China then became the axis of balancing globalization (multilateral approach) when the US chose protectionism.

Keywords: America First, Deglobalisation, Globalization, Global Financial Crisis (GFC)

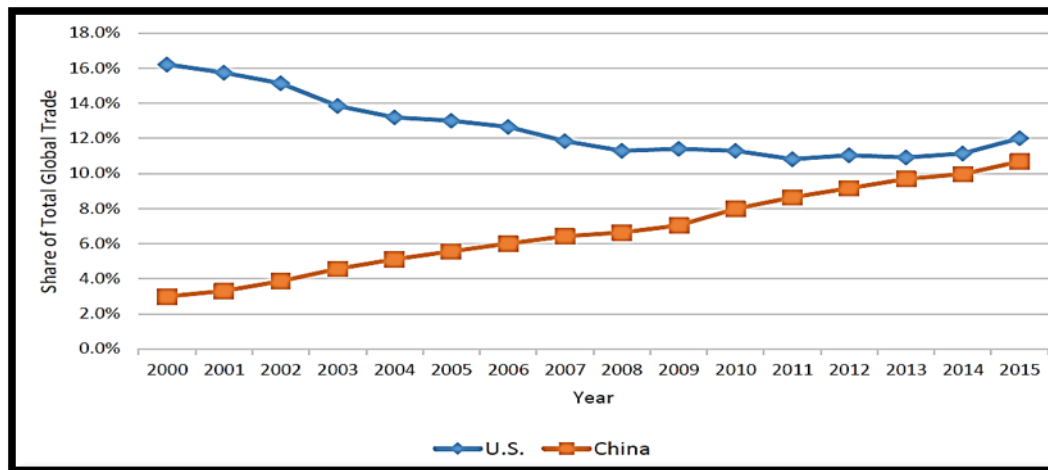
PENDAHULUAN

Secara mengejutkan kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) tidak sekedar membuat ketegangan bagi kelompok atau aliran politik yang mendukung wacana globalisasi. Kaum *hyper-globalist* mengalami guncangan yang sebelumnya merasa bahwa AS akan menjadi katalisator penggerak arah globalisasi. Namun, wacana deglobalisasi bermunculan menghiasi perpindahan kepemimpinan Obama ke Trump. Nativisme adalah istilah yang menggambarkan model kepemimpinan Trump yang memposisikan keberpihakan kepentingan bangsa AS. Model ini mewarnai diskursus *America First*, sekaligus terlihat sebagai politik transaksi sempit dan penuh resiko.

Wacana *America First* merupakan deklarasi sekaligus pesan kepada masyarakat dunia bahwa globalisasi harus berjibaku dengan model proteksi ekonomi yang didesain oleh kebijakan Trump. Disisi lain, China merasa kehadiran wacana tersebut dapat memperlambat laju globalisasi. Kepemimpinan Obama sebelumnya melalui administrasi Washington dengan agenda dan strategi kekuatan penting di Asia. Kepemimpinan Obama pada periode kedua memposisikan globalisasi adalah arena penting bagi peningkatan kompleksitas interdependensi global. Dengan *pivot to Asia* atau *Asia First* merupakan penegasan oleh Obama bahwa AS terlalu terkonsentrasi pada aktifitas sebagai aktor pemberi keamanan dunia lewat agenda kontra-terorisme, namun melewati perkembangan ekonomi spektakuler yang terjadi di Asia, khususnya di Asia Timur (termasuk Asia Tenggara). AS menyepakati pembentukan kerjasama mega-regional yang bernama TPP (Trans Pacific Partnership). Skema kerjasama perdagangan yang tidak hanya melibatkan berbagai negara, tetapi sebagai langkah ambisius untuk menerapkan perdagangan multilateral yang lebih mengikat.

Satu persatu kebijakan Obama yang dirasa merugikan pasca Krisis Finansial

Global (KFG) 2007/2008 mulai direvisi oleh Trump. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami degradasi dalam dekade KFG, sementara itu China mengalami pertumbuhan yang spektakuler (gambar 1). Melalui berbagai pendekatan, kepemimpinan Trump yang lebih mengedepankan perdagangan bilateral turut mempengaruhi globalisasi yang berlangsung. Sebuah tanda tanya besar mengemuka: ke mana AS dalam poros globalisasi? Dalam pertemuan puncak APEC yang berlangsung di Vietnam, dua kutub dunia yaitu AS dan China memberi pandangan yang cukup berbeda mengenai model perdagangan yang akan ditempuh. Trump dengan tegas menyatakan perdagangan global sepatutnya didesain menguntungkan bagi semua negara, sedangkan China melalui Xi Jinping memproklamasikan bahwa China akan tetap mendukung penuh jalannya globalisasi ekonomi, khususnya dalam pendekatan multilateral. Dalam karya seminal G. John Ikenberry mengungkapkan terjadi pertarungan serius antara kekuatan hegemon AS yang dapat bergeser ke China, khususnya di kawasan Asia Timur (termasuk di Asia Tenggara) (Ikenberry, 2015). Hal ini menjelaskan mengapa China memilih tetap mempertahankan model globalisasi yang berlangsung sekarang. Ketergantungan China dalam sistem sekarang terlihat dari pola kebijakan luar negerinya bersifat *outward looking* dengan orientasi ekonomi yang sifatnya mendukung kapitalisme global. Corak yang ditampilkan oleh China, dianggap Ikenberry sebagai upaya mempertahankan sistem yang ada (Ikenberry, 2011, p. 58). Hal yang patut diperhatikan disini ialah fenomena deglobalisasi yang berlangsung, apakah memberi legitimasi kepada China untuk tumbuh secara ekspansif ditengah misi wacana multilateralnya seperti RCEP dan One Belt One Road – kemudian ini menjadi kekhawatiran global selanjutnya?



Sumber: Wong, 2017.

Gambar 1.
Total Sebaran Perdagangan Global: US dan China

Tulisan ini akan menguji diskursus *America First* dalam kaitannya terhadap globalisasi. Tulisan ini mempertanyakan mengapa di tengah globalisasi yang berlangsung, kebijakan luar negeri Donald Trump justru menempuh pendekatan ekonomi politik proteksionis yang merupakan corak deglobalisasi. Tulisan ini akan menelusuri beberapa pertimbangan aspek ekonomi dan politik internasional sebagai instrumen utama untuk melihat kompetisi antara AS dengan China. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa implikasi yang ditimbulkannya bagi tatanan Asia yang diposisikan sebagai penyeimbang ekonomi dunia pasca krisis finansial 2007/2008.

Tulisan ini dipisahkan dalam tiga pembahasan utama. Pertama menjelaskan perubahan kebijakan AS di tangan Trump yang cenderung menghasilkan gejolak domestik maupun internasional terhadap sikap ekonomi politik nasionalis. Hal ini tentu bertolak belakang dengan visi AS sebelumnya. Pembahasan kedua menjelaskan tren kebijakan Trump yang dianggap sebagai kebangkitan deglobalisasi. Pembahasan ketiga menguraikan implikasi dari kebijakan Trump bagi Asia Timur.

Tinjauan Pustaka

Gagasan globalisasi mengundang berbagai kontestasi penafsiran yang pada akhirnya bersifat banal. Popularitas konsep ini terjadi oleh beberapa perubahan mendasar dalam struktur dan perilaku masyarakat (Baylish & Smith, 1998: 14). Globalisasi sering dipahami secara sederhana sebagai rujukan dalam beberapa perubahan signifikan yang terjadi dalam empat dekade terakhir dalam abad 20 (Scholte, 1997b: 14). Hal ini mempengaruhi penggunaan konsep globalisasi menjadi bebas nilai dan mudah diterima oleh beberapa disiplin ilmu, khususnya Hubungan Internasional (Clarck, 1997: 16). Scholte menyebut globalisasi secara praktis berpengaruh pada hubungan batas wilayah, hubungan keterbukaan wilayah, dan hubungan perubahan wilayah (Scholte, 1997a). Sementara itu, Michael Mann menyebut globalisasi secara konseptual membentuk jaringan interaksi (*socio spatial*) kedalam lima alur, yaitu: jaringan subnasional, jaringan nasional, jaringan internasional, jaringan transnasional, dan jaringan global (Mann, 1997: 475). Konsep dasar dari definisi globalisasi adalah kompresi ruang dan waktu, sehingga globalisasi menjadi keharusan dan periodisasi perkembangan zaman di mana terdapat intensifikasi melalui proses

integrasi masyarakat di berbagai negara menjadi masyarakat dunia. Imaji ini telah didengungkan oleh penganut Kantian, yang melihat dunia pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi *world citizenship* (Bastari & Rivai, 2017).

Merujuk pada pendapat David Mc Lellan, terdapat tiga aspek utama dari globalisasi. Pertama adalah meningkatnya volume arus modal atau finansial yang cukup signifikan. Proporsi aliran finansial meningkat lima kali lipat dibandingkan volume perdagangan biasa. Karakteristik yang kedua adalah kegiatan perdagangan dunia yang semakin terintegrasi, terutama di sektor perdagangan jasa. Karakteristik yang ketiga lebih fundamental dari sekadar proses ekonomi internasional, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mentransformasi kehidupan mayoritas masyarakat dewasa ini (Mc Lellan, 2005: 120).

Secara garis besar, spektrum globalisasi dilihat dari dua *frame* yang berbeda. Pendukung globalisasi merasa peran negara telah usang. Mereka cenderung menganggap globalisasi sebagai satu-satunya fakta historis yang paling penting dan relevan (Scholte, 2000: 17). Perspektif ini percaya bahwa globalisasi kontemporer didefinisikan melalui era baru masyarakat, di mana pun berada, semakin terdisiplinkan oleh adanya pasar global (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999: 2). Kenichi Ohmae berpendapat bahwa ekonomi global yang saling terkait menciptakan dunia tanpa batas yang dicirikan oleh pasar internasional yang terintegrasi secara sempurna, sehingga negara bangsa menjadi usang dan disfungsi dalam melaksanakan aktifitas ekonomi (Ohmae, 1995). Hal ini dipandang bahwa negara terkadang tidak menyadari eksistensinya mengalami transformasi, yang tadinya sekedar melindungi penduduk dan sumber daya alam dari ancaman eksternal, menjadi lebih luas yaitu melindungi lingkungan, mendidik angkatan kerja, dan membangun infrastruktur sosial

yang nyaman dan aman (Prakash & Hart, 1999: 12).

Pada sudut lain, pandangan skeptis percaya bahwa klaim tentang globalisasi telah dibesar-besarkan. Perbincangan tersebut tidak memiliki standar analisis atau sekedar pernyataan ideologis semata sehingga terlihat sebagai jargon, mitos dan retorika kosong belaka (Scholte, 2000: 18). Kaum skeptis berpendapat bahwa model Westphalia yang berpusat pada negara masih berlaku, pemerintah tetap memiliki otoritas di bidang ekonomi dan aktivitas bisnis melalui perusahaan sebagai perpanjangan tangan dari negara. Lebih skeptisnya lagi, kaum ini menganggap globalisasi bukan arena yang memberi kesejahteraan terlebih bagi negara-negara yang memiliki kekuatan rendah (Buzan, 1991; Waltz, 2000; Bello, 2005). Berlawanan dengan globalisasi, istilah “deglobalisasi” merujuk pada upaya dari pengurangan ketergantungan dan integrasi antara unit-unit yang saling berinteraksi dalam aspek-aspek tertentu seperti teknologi, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan bahkan ranah politik dalam skala global. Kalangan ini menilai bahwa globalisasi tidak memberikan manfaat signifikan.

Dalam praktek globalisasi, status internasional suatu negara bergantung pada sumber dayanya. Negara dengan ekonomi kuat secara otomatis menjadi negara adidaya. Hal ini berkaitan dengan intervensi ekonomi yang dilakukan negara ekonomi kuat terhadap negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Intervensi tersebut dilakukan melalui skema bantuan dana kepada negara-negara berkembang yang baru menganut demokrasi. Negara-negara tersebut diberi akses ke pasar bebas. Namun, yang terjadi adalah negara-negara lemah akan kesulitan mencapai tujuannya karena sistem dikuasai dominasi negara kapitalis. Pendekatan skeptis menyangkal dari asumsi pendukung globalis yang menyebut kondisi ekonomi global berada pada kondisi interdependensi (Held,

McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999: 5). Mereka lebih jauh berpendapat bahwa kekuatan internasionalisasi sifatnya dependen pada kekuatan negara untuk memastikan liberalisasi ekonomi terus berlanjut atau sebaliknya. Artinya, negara tidak lah menjadi aktor yang pasif, melainkan negara sebagai arsitek dari model dunia hari ini (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999: 6).

Kontestasi di atas menyimpulkan satu tema utama, yaitu; apakah negara dibutuhkan atau kah sebaliknya? Martin Shaw memandang globalisasi tidak merusak atau mendisiposisikan negara, melainkan negara justru bertransformasi kedalam bentuk-bentuk yang tersedia (Shaw, 1997: 297). Kesalahan kontradiksi antarnegara dan globalisasi ini lebih disebabkan keterbatasan teorisasi negara. Pada mulanya, Shaw mengidentifikasi bentuk negara kontemporer sepatutnya melepaskan istilah *nation state* dengan mengistilahkannya sebagai institusi yang kompleks. Globalisasi harus dimaknai sebagai pendorong penguatan negara-negara yang tadinya tidak dilihat sebagai kekuatan penting, namun hadir sebagai kekuatan-keuatan baru.

Pandangan yang cukup sama datang dari David Armstrong, bahwa pengucilan negara dalam konteks globalisasi adalah sesuatu yang naif. Globalisasi yang dilihat menihilkan negara, justru tidak dapat menyangkal bahwa interaksi antarnegara justru semakin meningkat dalam kondisi sekarang” (Armstrong, 1998: 475). Lain halnya yang menilai eksisnya suatu negara dalam arena globalisasi memberi peluang entitas negara mengalami evolusi bentuk *governance* dan letak atau lokus dari kedaulatan, dimulai dari masyarakat yang bersifat kesukuan atau tribal, kemudian menjadi *city states*, *nation-states*, *regional states* hingga tahap akhirnya adalah *global states* (Brinkman & Brinkman, 2008: 426).

Salah satu konsekuensi adanya pesimisme dalam menyikapi fenomena globalisasi, terutama terkait dengan

menurunnya peran negara, adalah wacana “deglobalisasi”. Menurut Niall Ferguson, wacana deglobalisasi adalah suatu keniscayaan karena pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada era sebelum Perang Dunia I. Pada masa tersebut, terutama pada sekitar 1870 hingga terjadinya Perang Dunia I, dunia mengalami perubahan yang mirip dengan keadaan yang kita alami sekarang. Mobilitas perdagangan, modal dan buruh ketenagakerjaan, komunikasi yang berkembang cepat melalui telegram yang melintasi Samudera Atlantik, ekspor barang dan aliran modal mencapai volume yang tertinggi dan tidak dapat disamai hingga dekade 1980-an. Namun, segala kemajuan tersebut seakan berhenti ketika pecah Perang Dunia I (Ferguson, 2005: 64).

Menurut Niall Ferguson terdapat lima faktor yang bisa mendorong deglobalisasi yang paralel dengan keadaan sebelum Perang Dunia I. Pertama, aliansi yang tidak stabil. NATO merupakan sebuah contoh aliansi yang sudah usang dan tidak relevan pasca berakhirnya Perang Dingin. Ketidakberdayaan aliansi ini akan fatal jika dikaitkan dengan faktor kedua dan ketiga yaitu munculnya negara yang menjadi sponsor terorisme dan organisasi terorisme sendiri yang semakin canggih dan terstruktur. Kemunculan Al-Qaeda dan negara seperti Afghanistan atau Suriah yang dianggap sebagai penyokong terorisme, mirip dengan kemunculan Bolshevik di Rusia yang juga menebarkan terror yang dalam skala yang lebih luas (Armstrong, 1998: 461).

Faktor keempat dan kelima menurut Niall Ferguson, adalah imperium atau hegemon global yang mengalami penurunan kekuatan dan rivalitas antar-*great power*. AS saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah imperium yang sudah melewati puncak kejayaannya. Defisit anggaran semakin membesar seiring dengan bertambahnya jumlah angka penduduk yang lanjut usia sehingga jumlah pengeluaran jaminan sosial turut bertambah. Kemampuan mengirim pasukan

ke luar negeri juga semakin menurun, dengan hanya mencapai 500.000 personel, jumlah yang sangat kecil untuk bisa memenangkan perang atau konflik skala kecil yang melibatkan AS di seluruh dunia. Faktor terakhir adalah adanya rivalitas antara China dengan AS.

Dari berbagai perkembangan literatur diatas, penulis menawarkan sebuah signifikansi berupa keterbaharuan mengenai diskusi deglobalisasi. Uniknya, perlawanan globalisasi yang tadinya hampir diisi oleh beberapa negara yang menganggap globalisasi merugikan karena menimbulkan ketidakadilan perdagangan dari sistem neoliberalisme. Namun, peningkatan tren deglobalisasi justru berlangsung di beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. AS adalah salah satu negara yang mulai merasa globalisasi yang berlangsung justru merugikan. Tulisan ini menganalisis gejala deglobalisasi melalui rezim kepemimpinan Donald Trump dan memiliki implikasi bagi arah pencaturan globalisasi di Asia Pasifik.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deduktif secara intensif. Tipe penelitian relatif yaitu deskriptif. Data akan berbentuk data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi berupa studi pustaka. Sementara itu, data primer diambil dari laporan perdagangan dan investasi, tren demografi populisme baru, dan tren globalisasi. Penafsiran dan penarikan kesimpulan tulisan dilakukan dengan cara menganalisa temuan, atau dalam hal ini adalah data yang diperoleh dengan menggunakan kerangka teoritis yang dikonstruksi sebelumnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan AS yang Berubah

Terdapat banyak perhatian yang akan melihat bagaimana kebijakan luar negeri AS melalui Trump. Setidaknya, untuk mengetahui apakah wacana yang

dikemukakan Trump baik dalam momen kampanye maupun pasca keterpilihannya bertendensi dua kemungkinan; Trump memang akan melakukan perubahan kebijakan luar negeri mengacu pada konsektif paradigma nasionalistik, atau apakah Trump justru menempuh kebijakan pragmatis, dengan melihat ketergantungan AS dalam poros globalisasi yang sangat tinggi dan sekaligus sebagai *hegemonic power*.

Trump memproklamasikan wacana *America First* atau *make America great again*. Secara sederhana, wacana tersebut dapat diartikan sebagai upaya membawa AS kembali dalam posisi kejayaannya saat membingkai globalisasi pasca-Perang Dunia II dan menjadi pemenang dalam Perang Dingin. Pada saat pidato kemenangannya, Trump mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan orang-orang kreatif, berbakat, dan cerdas untuk dimanfaatkan dalam membangun AS bagi kebaikan dan manfaat bagi semua warga AS (Suastha, 2016). Menurut pandangan Pollack, Trump berusaha untuk menjadikan AS seperti tiga dekade yang lalu, yaitu ketika AS sangat berpengaruh di dunia. Trump menilai AS pada hari ini sebagai AS yang mengalami kemunduran ekonomi yang itu disebabkan oleh negara lain yang mengambil keuntungan dari AS. Lebih lanjut, Pollack menyatakan bahwa kebijakan Trump akan bersifat proteksionis dan arah unilateral (Pollack, 2017). Demikian juga Siswanto berpendapat bahwa dari segi ekonomi, akan ada semacam rasionalisasi kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kebijakan internal sehingga tidak akan terlalu ekspansif. Kebijakan AS akan cenderung lebih tertutup atau introvert (Suastha, 2016). Maka, *America First* diimplementasikan ke dalam beberapa kebijakan sebagai berikut:

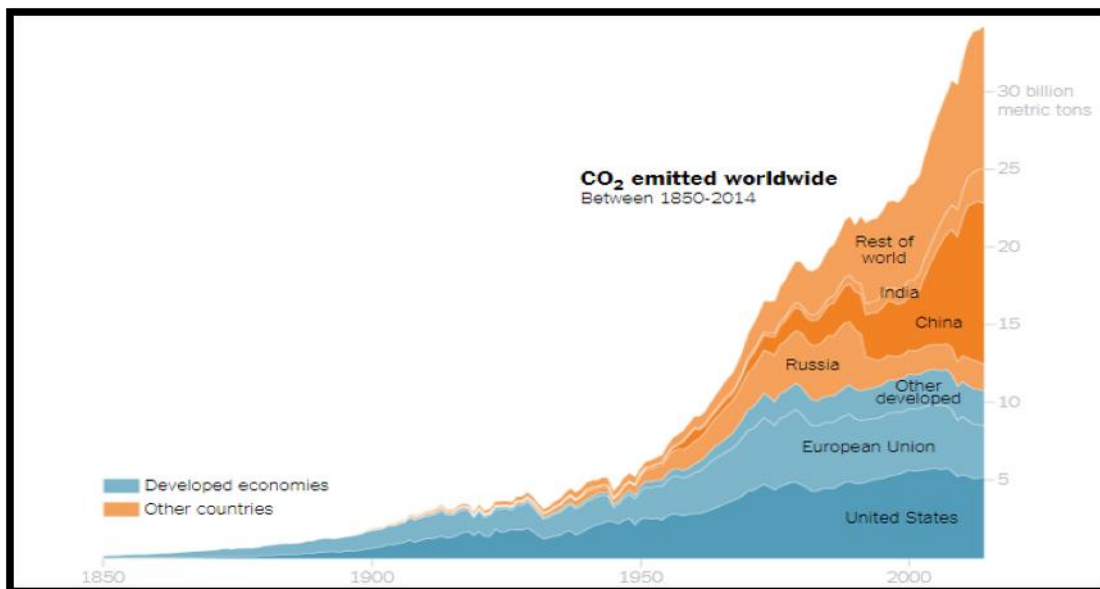
Kebijakan Keamanan Wilayah

AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mengagendakan untuk membangun tembok pembatas wilayah selatan AS yang

menjadi pembatas antara AS dan Meksiko. Panjang tembok yang akan dibangun sepanjang 3.200 kilometer. Terdapat berbagai kendala dalam pembangunan ini terutama terkait dengan pendanaan proyek ini. Meskipun demikian, Trump bersikeras akan tetap membangun tembok pembatas AS-Meksiko tersebut (Menendez, Ryan, & Paul, 2017). Pembangunan tembok batas negara ini disebabkan banyaknya imigran asal Meksiko yang masuk ke wilayah AS. Trump menganggap imigran asal Meksiko terutama imigran ilegal hanya menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan nasional terutama di wilayah selatan AS. Para imigran dianggap sebagai dalang dari berbagai tindak kriminal yang sangat merugikan. Tentunya hal ini berdampak kepada daya saing yang lebih tinggi bagi pekerja AS. Melalui kebijakannya, Trump berupaya untuk lebih memprioritaskan masyarakat AS di tengah kompetisi dan persaingan global terutama dengan imigran Mexico (Orrenius & Zavodny, 2017).

Kebijakan Perubahan Iklim

Bagi Trump, isu perubahan iklim bukan menjadi prioritas utama AS. Isu perubahan iklim dianggap hanya akan menghambat kemajuan AS dalam aspek ekonomi. Beberapa keputusan kontroversial yang Trump tunjukkan dengan menandatangani pencabutan AS dari *Environmental Protection Agencies* (EPA) dan the *Clean Power Plan* (CPP) pada tahun 2017 serta keluar dari kesepakatan atau perjanjian *Paris Agreement* (Fransen & Levin, 2017). Pada era Obama, beberapa kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis AS untuk menunjukkan posisinya di panggung Internasional pada isu lingkungan terutama terkait dengan perubahan iklim. Bahkan pada *Paris Agreement* 2015, AS melalui presiden Obama menjadi pelopor terbentuknya perjanjian tersebut. Namun bagi Trump hal ini tidaklah penting, AS harus mampu memaksimalkan potensi energi yang dimilikinya untuk kemajuan AS (BBC News, 2017). Lihat gambar di bawah ini:



Sumber: Gillis & Popovich, 2017.

Gambar 2.

Emisi CO2 dari Beberapa Negara Besar

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa AS merupakan penghasil

karbon dioksida pertama di dunia. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fossil fuel

dalam setiap aspek kehidupan masyarakat AS berikut dengan pembangunan dan kemajuan ekonomi (Gillis & Popovich, 2017).

Kebijakan Keamanan Wilayah dan Imigrasi

Kebijakan penting juga diberlakukan pada sektor imigrasi. Trump melarang beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim memasuki wilayah AS, termasuk para pengungsi Suriah yang tersebar ke berbagai negara untuk mencari perlindungan (*travel ban*). Kebijakan ini memiliki kaitan erat dengan perlawanan terhadap terorisme (BBC News, 2017). Dapat dipahami bahwa Trump bersikap lebih memproteksi negaranya secara langsung tanpa ada keterkaitan dengan pihakatau negara manapun dalam menekan aksi terorisme yang terjadi di AS melalui kebijakan di bidang imigrasi. Berbeda dengan presiden AS sebelumnya, Bush dan Barack Obama, mereka justru lebih banyak melakukan kerjasama militer secara umum dengan berbagai negara untuk memerangi tindak teroris (*War on Terror*). Trump dinilai lebih mementingkan AS secara khusus daripada negara-negara di luar AS.

Kebijakan Proteksionisme Baru

Salah satu perhatian kebijakan Trump yang cukup mengemuka ialah model ekonomi yang cenderung proteksionis. Pada hari pertama menjabat, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menarik AS dalam kemitraan *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang selama ini menjadi perhatian Obama dengan wacana *economic balancing* di Asia Pasifik. Hari kedua, Trump mengkonfirmasi kepada Kanada dan Meksiko tentang niatnya dalam menegosiasikan ulang atas *North America Free Trade Area* (NAFTA). Fenomena ini kemudian memberi afirmasi kepada golongan skeptis bahwa Trump terkesan retorik semata. Sayangnya, Trump menempuh kebijakan ekonomi luar negeri yang cenderung memutarbalikkan fakta mengenai posisi AS dalam arena globalisasi.

Secara historis, AS dikenal sebagai pendorong sekaligus penikmat globalisasi ekonomi, yang mana lebih dari 70 tahun mendapat manfaat bagi akselerasi perekonomiannya. Krisis finansial AS membawa malapetaka bagi pertumbuhan ekonomi domestik maupun global, tetapi AS harus mengingat pendapatan per kapita setiap orang di AS telah tumbuh, yang tadinya dalam kisaran \$15.000 sampai lebih dari \$50.000 antara tahun 1950 dan 2015 (Goodman, 2017). Matthew Goodman menghimpun fenomena ekonomi global dalam bentuk kekurangan utama selama tujuh dekade belakang, yaitu tidak lagi memberikan manfaat yang begitu luas. Sayangnya, Trump justru hadir dan memperparah resiko tersebut jika menempuh kebijakan yang proteksionis.

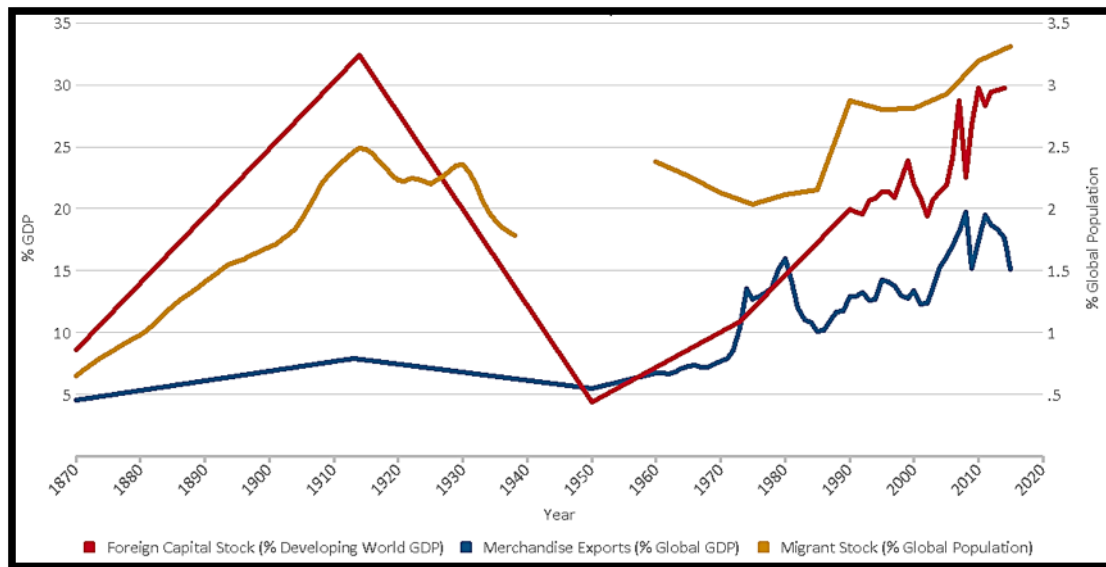
Kebijakan yang ditempuh oleh Trump merupakan karakter utama dari realisme ekonomi politik, yang mana pertimbangan utamanya ialah keamanan politik dan keamanan ekonomi. Logika *wealth to power* merupakan alur yang tepat untuk menjelaskan dinamika politik yang terjadi selama ini. Terdapat beberapa analisa yang cukup mengemuka dalam memperhatikan pendekatan tersebut. Jika dihimpun, maka pendekatan Trump sebagai usaha bina negara (*statecraft*) melalui dimensi ekonomi-politik yang tidak terpisahkan. Pertama, AS mendapat beban yang terlalu besar sebagai kekuatan besar dunia khususnya dalam keamanan internasional sementara negara-negara lain menikmatinya. Kedua, AS saat ini mengalami degradasi ekonomi dimana perdagangan global yang berbasis multilateralisme dianggap merugikan.

Donald Trump dan Masa Depan Globalisasi

Masyarakat internasional yang bersuara mendukung globalisasi sepenuhnya mengalami kekhawatiran di tengah sistem proteksionis ala Trump. Keterpilihan Trump yang membutuhkan reevaluasi mengenai masa depan globalisasi

patut menjadi perdebatan utama dalam tulisan ini. Sebuah publikasi yang cukup menarik dituliskan oleh Laurence Chandy and Brina Seidel menegaskan bahwa globalisasi yang terlihat sebagai kelanjutan *second wave of globalization* berada pada ambang kemunduran (Chandy & Seidel, 2017). Meskipun demikian, gejala integrasi ekonomi global pada tahun belakangan, khususnya pasca-Perang Dingin, telah

memunculkan pendalaman regionalism, khususnya kerjasama ekonomi. Tetapi, klaim Chandy dan Seidel menyangkal asumsi-asumsi yang menilai globalisasi di abad ke-21 tidak mengalami keberlanjutan. Sayangnya, keberlanjutan globalisasi mengalami rintangan yang cukup dahsyat khususnya dalam sektor ekonomi global. Hal ini dapat diperhatikan dalam gambar 3 mengenai tren globalisasi.



Sumber: Chandy & Seidel, 2017.

Gambar 3.
Tren Globalisasi 1870-2020

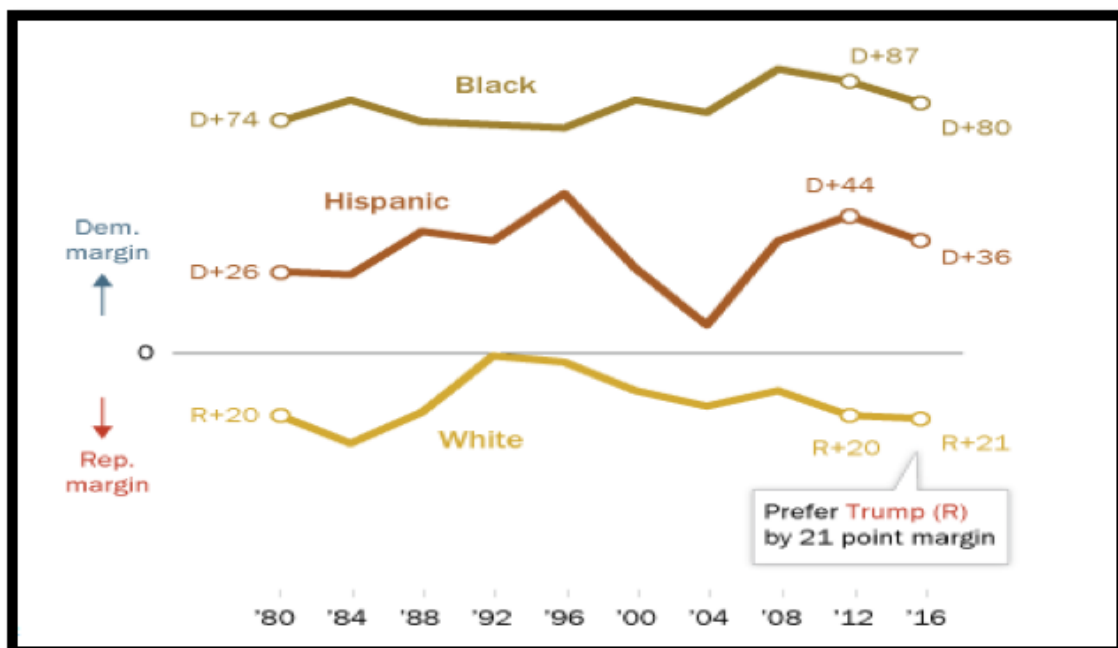
Para pemimpin bisnis yang mengalami kejayaan lewat globalisasi harus membayangkan hidup ditengah kerapuhan ekonomi pasca-krisis finansial global 2008 dan munculnya figur Trump. Mitos mengenai wacana globalisasi bagi *hyperglobalist* tentang dunia tanpa batas secara asumsi hingga realitas mulai hancur. Pilar ekonomi pasar terbuka (*open market*) yang ditawarkan oleh pengawal neoliberalisme seperti AS dan Inggris mulai menjadi anomali. AS justru memandang globalisasi yang berlangsung makin memperdalam kemundurannya, sedangkan Inggris tahun 2016 mengambil pilihan untuk keluar dari kerjasama Uni Eropa. Fenomena ini kemudian menguji kehadiran globalisasi saat ini.

Proklamasi Trump mengenai revisi kerangka kerja sama ekonomi yang lebih proteksionis membuat gejolak dan kegelisahan para pelaku dan pengamat ekonomi khususnya bagi ekonom di AS maupun diluar negara tersebut. Dekade ke depan menjadi tanda tanya besar, apakah aktor pebisnis dapat berkompromi dengan sistem yang ada ataukah sebaliknya? Pembahasan ini sekaligus sebagai antitesis dari karya seminal Thomas L. Friedman yang meyakini bahwa dunia yang semakin datar dan perusahaan global—tidak lagi dibatasi oleh demarkasi negara (kedaulatan) dan akan mendominasi ekonomi dunia (Friedman, 2007). Klaim ini secara realitas terbukti salah. Saat ini, globalisasi telah mengalami kemunduran

dengan dihadapkannya sikap *new protectionism*. Penulis menganggap fenomena yang berlangsung memberi sebuah kesimpulan besar bahwa tren globalisasi yang dibangun AS tidak terlepas dari krisis finansial global 2008. Fenomena ini kemudian membawa peta baru bagi kebijakan AS dalam arena globalisasi, yang mana kepemimpinan Trump terkesan menggambarkan suatu kondisi “titik jenuh” atas globalisasi, padahal Trump dikenal sebagai pebisnis besar AS.

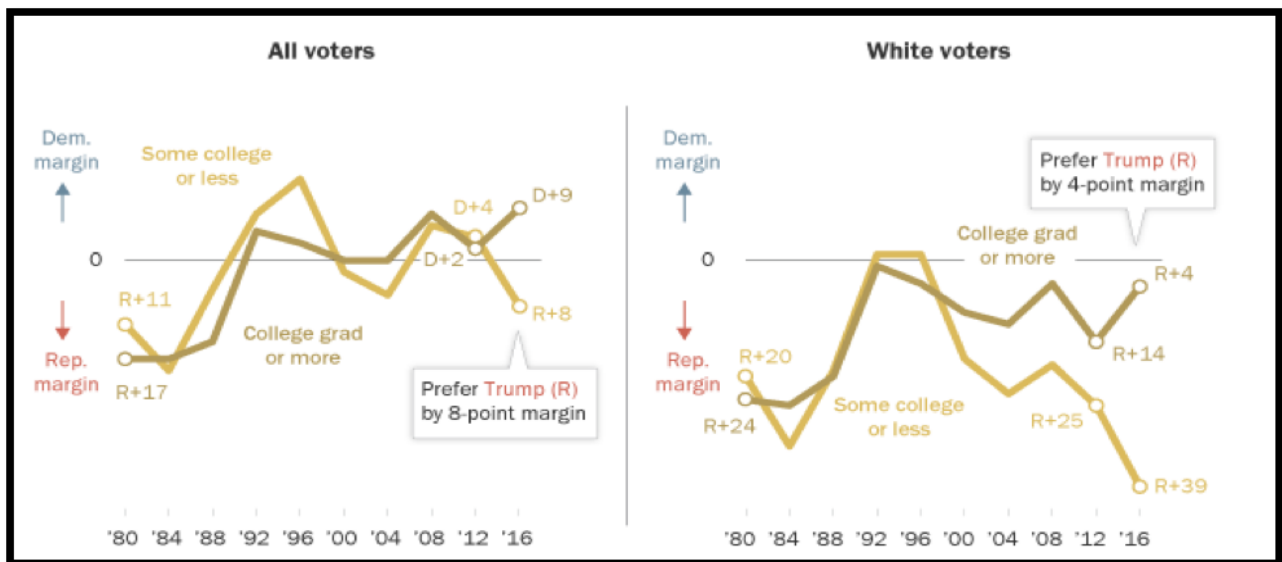
Mengapa di tengah globalisasi yang berlangsung pemerintah Trump justru

menempuh pendekatan deglobalisasi? Apa konsekuensi perubahan tersebut terhadap masa depan globalisasi? Terdapat beberapa yang perlu ditimbang dalam disukusi ini, ialah: (1) bagaimana globalisasi dirasakan oleh para pekerja AS mendorong terpilihnya Trump sebagai presiden; (2) bagaimana dampak ekonomi dan sosiopolitik globalisasi dirasakan oleh pengambil keputusan AS pada administrasi Trump mempengaruhi masa depan globalisasi.



Sumber: Tyson & Maniam, 2016.

Gambar 4.
Preferensi Kandidat Presiden dari Ras atau Etnisitas



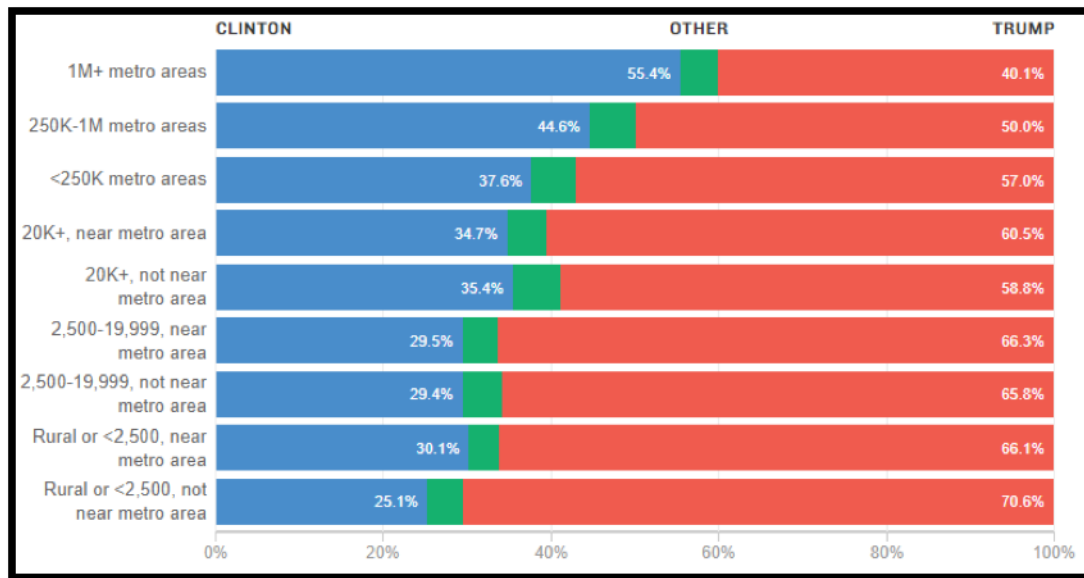
Sumber: Tyson & Maniam, 2016.

Gambar 5.
Preferensi Kandidat Presiden melalui Latar Belakang Pendidikan

Untuk memahami bagaimana Trump didorong ke tampuk kekuasaan presiden diperlukan untuk mempertimbangkan rincian demografi yang memilihnya. Secara ringkas, mereka berkulit putih, tidak memiliki pendidikan tinggi, dan tinggal di daerah pedesaan dan kota kecil. Dapat dilihat dari gambar 4 dan gambar 5 bahwa orang yang berkulit putih, khususnya yang tidak berpendidikan tinggi lebih cenderung mendukung Trump. Dapat dilihat dari gambar 6 bahwa pendukung Trump lebih cenderung tinggal di daerah *rural*. Selama kampanye, pendukung Trump ini berkali-kali mengatakan bahwa mereka merasa diabaikan, bahwa ekonomi meninggalkan mereka (Kurtzleben, 2016). Para pemilih ini yang merasa bahwa mereka diabaikan dan ekonomi membiarkan mereka di belakang memberikan suara untuk seseorang yang berhasil mengulurkan tangan pada kekhawatiran mereka, yakni Trump.

Apa hubungan diantara demografis tersebut dan fenomena globalisasi?

Perubahan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi dan pekerja migran dianggap sebagai alasan kenapa mereka ditinggalkan oleh ekonomi. Sebagai contoh, terdapat satu daerah di AS yang dikenal sebagai "*Rust Belt*". Daerah ini menjadi pusat industri otomotif di AS selama abad ke-20. Namun, daerah ini terkena masalah seperti kemunduran industri besi dan baja, pemindahan proses manufaktur ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, penurunan kebutuhan tenaga kerja akibat bangkitnya otomasi dalam proses industri, dan liberalisasi kebijakan perdagangan dengan adanya globalisasi (Alder, et al., 2014). Akibatnya, daerah ini menghadapi banyak kesulitan termasuk hilangnya populasi, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Warga *Rust Belt* ini mencocokkan demografi yang disebutkan di atas untuk para pendukung Trump. Globalisasi dan migrasi dianggap sebagai ancaman bagi demografis tersebut.

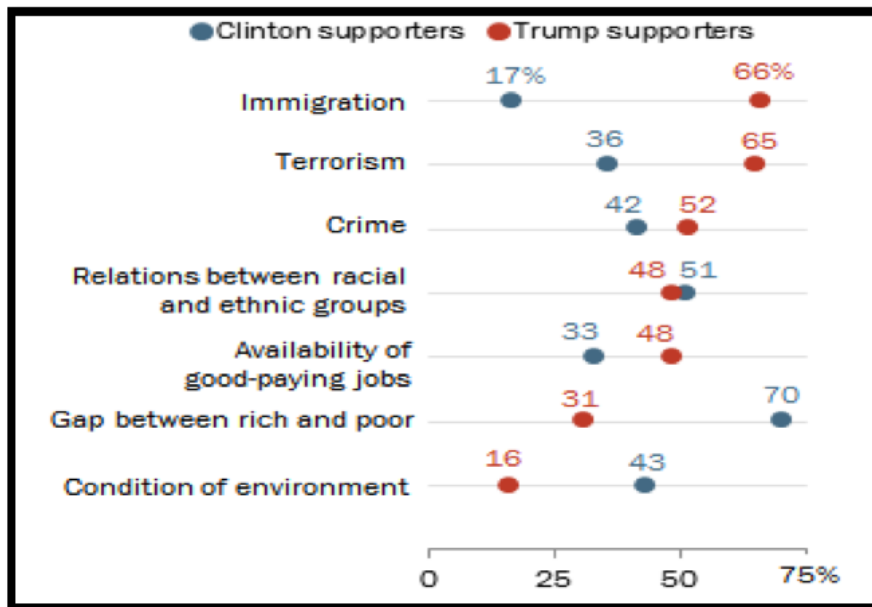


Sumber: Kurtzleben, 2016.

Gambar 6.
Sebaran Pemilih Kedua Kandidat Presiden

Kesamaan diantara pendukung Trump adalah bahwa mereka yakin mereka adalah pecundang globalisasi, dimana globalisasi dikatakan sebagai isu terbesar dalam pemilihan Trump (Alden, 2016). Dapat dilihat dari Gambar 7 bahwa para pendukung Trump melihat imigrasi sebagai ancaman yang setara dengan terorisme (Doherty, 2016). Oleh sebabnya, mereka memilih Trump yang berjanji bahwa negara akan melindungi kembali mereka dengan menghapus ancaman globalisasi dan

membuat negara mereka menjadi hebat lagi. Misalnya, Trump telah berjanji untuk menegosiasi ulang NAFTA kepada penduduk daerah Rust Belt yang "menjadi lebih tua, kurang berpendidikan, kurang memiliki serikat pekerja, kurang urbanis dan lebih picik," dan karenanya menginginkan perubahan (McClelland, 2016).



Sumber: Doherty, 2016.

Gambar 7.

Presentase Pendukung Trump dan Clinton terhadap Serangkaian Isu

Pandangan tentang globalisasi yang dimiliki oleh publik AS ini sejalan dengan bagaimana pengambilan keputusan pemerintah Trump melihat globalisasi. Pada pidato pengukuhan, Trump telah menyebutkan bahwa dia akan menempatkan *America First*, yang mana AS akan memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri di atas segala hal lainnya. Pada saat ini, ide *America First* direalisasikan baik dalam kebijakan ekonomi maupun non ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, globalisasi dianggap tidak menjadi pilihan optimal bagi kepentingan AS. Paradigma multilateral *free trade* dianggap justru merugikan kepentingan ekonomi AS. Dalam pidatonya di KTT APEC di Vietnam, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan "dimanfaatkan lagi". Menurut Trump, AS "tidak bisa lagi menoleransi penyalahgunaan perdagangan kronis ini" dan "tidak akan mentolerirnya" (Aljazeera, 2017). Strategi *America First* ini diwujudkan oleh preferensi Trump dengan memilih kesepakatan perdagangan bilateral daripada perdagangan multilateral, dan kebijakan proteksionisme daripada

perdagangan bebas. Contoh hasil spesifik dari pergeseran sikap AS terhadap globalisasi ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pergeseran sikap AS terhadap globalisasi ini juga terlihat di bidang non-ekonomi. Dari sudut pandang politik, globalisasi dianggap merugikan kepentingan AS. Berdasarkan ide *America First*, AS telah mengambil tindakan seperti menarik diri dari kesepakatan iklim Paris. Menurut Trump, kesepakatan iklim Paris sangat tidak adil bagi AS dan merongrong ekonomi AS (Chakraborty, 2017). AS juga menuntut peran yang lebih kecil sebagai entitas negara dalam masalah-masalah internasional. Kewajiban dan tanggung jawab yang diharapkan 'komunitas global' dari AS dalam dunia menggloabal juga dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS, yaitu dianggap sebagai beban yang tidak diinginkan oleh AS sehingga tidak sesuai dengan nilai *America First*. Dalam rangka mementingkan kepentingan AS atas segalanya, AS sedang dalam proses menolak dan mengabaikan tuntutan globalisasi. Faktor-faktor tersebut, yaitu persepsi pendukung AS dan tanggapan para

pengambil keputusan terhadap dampak globalisasi, mendorong pemerintah Trump untuk menempuh jalan deglobalisasi yang didasarkan pada pendekatan *America First*.

Trump Sekedar Retoris

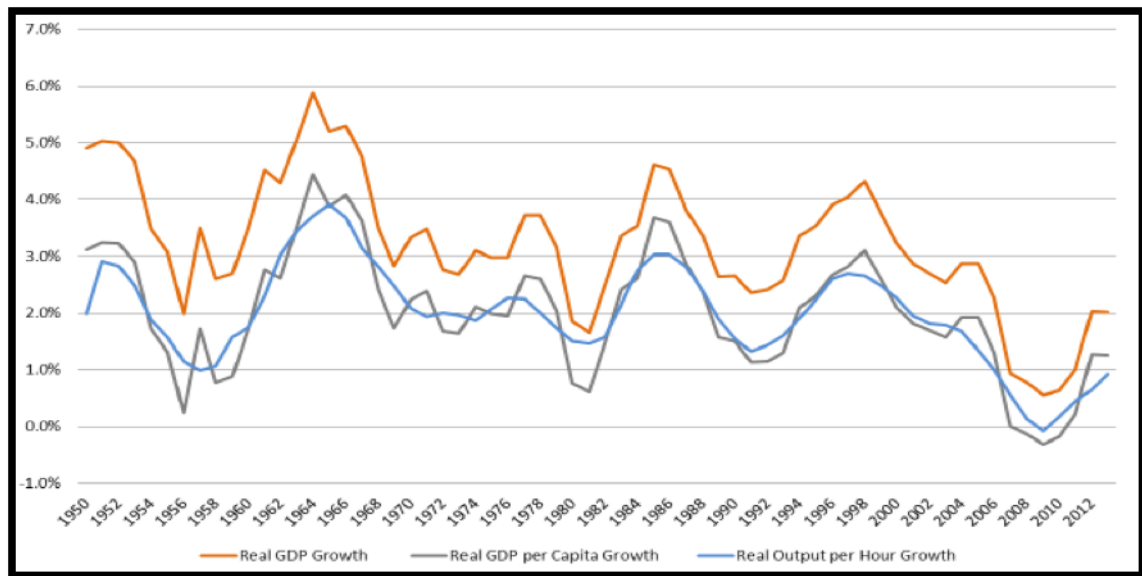
Dalam pertemuan puncak APEC yang berlangsung di Vietnam terdapat penggalan carita yang menarik, yaitu: (1) APEC mewacanakan ekonomi perdagangan global yang bersifat inklusif, (2) merespon isu-isu krusial, salah satunya ekonomi digital; (3) APEC masih terus menjadi tumpuan bagi 21 negara anggota maupun negara diluar keanggotaan khususnya kawasan Asia pasifik dalam arsitektur perekonomian global; (4) pertemuan ini menjadi ajang duel antar kepentingan AS dan China. Secara ringkas sekaligus menarik perhatian global ialah kepemimpinan Trump membawa enigma bagi perekonomian global, khususnya di Asia Pasifik.

Pada awal 2017, Trump meminggirkan TPP sebagai unit kerja sama mega regional atau multilateral dengan pertimbangan AS akan lebih memprioritaskan doktrin *America First*. Dalih yang sering diungkapkan presiden AS tersebut sebagai respon dari kegagalan kerjasama multilateral. Secara sepihak, Trump merasa bentuk kerjasama yang tersedia justru merugikan kepentingan ekonomi ekonomi AS. Pernyataan Trump yang seringkali disorot oleh media adalah simptom nasionalisme ekonomi ditengah globalisasi.

Wacana proteksionisme yang sering dikesankan melalui kepemimpinan Trump sejatinya telah berlangsung dalam kepemimpinan Barack Obama, khususnya pasca krisis finansial 2008. Turbulensi ekonomi AS bergerak mengusik pertumbuhan ekonomi global. Rantai krisis lambat laun direspon dengan

mengembalikan peran negara sebagai institusi total dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. AS melakukan upaya penyelamatan sektor perdagangan dan keuangan domestik dengan keterlibatan negara yang lebih aktif sebelumnya. Wacana neoliberalisme yang seringkali menjadi nafas globalisasi mulai kurang bergairah sebab negara mulai menerobos aktivitas ekonomi yang tadinya membiarkan pasar sebagai aktor utama. Sayangnya, narasi ini tidak menggema seperti awalnya yang selalu diwacanakan oleh AS. Pada momen krisis dan sesudahnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS terlihat inkonsisten dengan prinsip WTO yang mengedepankan dua hal, yaitu anti diskriminasi produk, dan pengurangan atau penghilangan batasan dan hambatan dalam perdagangan global.

Setelah pergantian kepemimpinan Obama ke Trump, tanda-tanda proteksionisme mulai melambung yang bukan hanya dalam konteks ekonomi-politik semata, melainkan dalam ruang sosial seperti pembatasan arus perpindahan manusia. Penulis memperhatikan kondisi yang dilakukan oleh kepemimpinan AS saat ini tidak lepas dari krisis 2007/2008 sekaligus menjadi kebangkitan kembali negara dan nasionalisme (lihat gambar 8). Fenomena ini kemudian secara gradual melemahkan performa ekonomi AS. Kalangan *hyperglobalist* memiliki imajinasi bahwa tatanan globalisasi mampu menimbulkan denasionalisasi bahkan meredupkan peran negara khususnya dalam bidang ekonomi (Prakash & Hart, 1999: 11-12). Hal ini ditandai oleh sinyal perkembangan progresif masyarakat dan politik yang bersifat seragam dan terintegrasi (Held & McGrew, 1997).



Sumber: Keightley, et al., 2016: 3.

Gambar 8.
Pertumbuhan Ekonomi AS, 1950-2012

Persoalannya, di tengah adanya kondisi integrasi ekonomi dan politik yang mulai tumbuh antarnegara, wacana nasionalisme tetap saja menjadi kemewahan tersendiri bagi negara-negara tertentu (Walt, 2011). Momentum krisis global justru memberi fakta bahwa negara kembali dibutuhkan. Penulis memandang fenomena ini merupakan babak baru bagi entitas negara yang mengalami transformasi ke dalam bentuk-bentuk yang tersedia, sehingga narasi globalisasi harus dimaknai juga sebagai pendorong penguatan negara-negara yang tadinya tidak dilihat sebagai kekuatan penting, namun hadir sebagai kekuatan-keuatan baru seperti kebangkitan spektakuler China. Negara adalah unit politik yang paling fenomenal yang berusaha mempertahankan otoritasnya (*state sovereignty*), sekalipun dibayangi dengan kekuatan aktor selain negara (pasar) (Sassen, 2003: 242).

Hadirnya fenomena krisis finansial global dan penguatan peran negara adalah dua tantangan utama bagi globalisasi. Secara umum, kebijakan *statecraft* Trump memberi perhatian utama bahwa upaya pendalaman peran negara (*deep state*)

untuk merespon persaingan ekonomi-politik tentu dipertimbangkan kedalam aspek keamanan ekonomi dan politik (Michaels, 2017). Salah satu respon utama yang dilakukan oleh Trump ialah memposisikan kembali China dihadapan AS dan poros globalisasi. China merupakan salah satu negara yang mengalami keberhasilan ekonomi lewat sistem globalisasi. Namun, kepemimpinan China dibawah Xi Jinping sedikit besarnya mengalami batu sandungan di tengah ketidakpastian Trump dalam merespon globalisasi, dan khususnya memposisikan China sebagai musuh ekonomi.

AS dan China telah lama membentuk hubungan perdagangan yang cukup kompleks dan mempengaruhi arah globalisasi ekonomi. Trump, seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, membawa ketidakpastian mengenai globalisasi sekaligus bagi posisi China ke AS. Preferensi ekonomi AS yang terkesan proteksionis dan menerapkan pendekatan merkantilisme terhadap kebijakan ekonomi tentu menjadi alarm kewaspadaan bagi ekonomi global. Secara khusus, selama kampanye Trump waktu

lalu, Trump seringkali menjatuhkan kritiknya kepada China sebagai target potensial yang akan diberi sanksi (*stick*) perdagangan. Terdapat dua perhatian utama bagi Trump, yaitu: (1) Trump menuduh China sebagai manipulator mata uang (Wickett, 2007: 30).; (2) Trump menuduh China telah mencuri *American Jobs* dengan kebijakan ekspor *dumping* dan mengancam memberi sanksi ekonomi dengan pemberlakuan pembayaran ganti rugi sebesar 45% dari tarif impor China (Nguyen, 2017: 126). Sebuah teka-teki yang patut dijawab, apakah Trump akan melakukan pendekatan sanksi ekonomi kepada China? Hal yang patut diperhatikan ialah terdapat kesulitan untuk menempuh kebijakan tersebut disebabkan kelesuan ekonomi di tengah penyusaian struktural yang sulit pasca-krisis finansial global.

Sebelum tahun 2014, yuan menguat mencapai lebih dari 20% terhadap dollar AS. Saat ini, mengalami persoalan yang serius sebab tahun 2016 mengalami kejatuhan sebesar 7%. Dengan keberhasilan arus modal yang cukup ekspansif, China telah melakukan berbagai strategi dalam menjaga stabilitas nilai tukar dengan memperketat kontrol modal (Wong, 2017). Namun, Trump merasa tetap dirugikan dengan spekulasi nilai tukar tersebut. Kebijakan mata uang Trump di China kemungkinan akan memperoleh hasil yang lebih buruk. Sebagai perbandingan, Trump ingin menempuh pemberian sanksi ekonomi ke China dalam sektor perdagangan. Hal ini dianggap bermasalah dan lebih berbahaya. Logika Trump terkesan naif dan cenderung berfikir ala aktor bisnis "*Take It, or Leave It*". Pembatasan perdagangan secara parsial dengan sanksi terhadap impor China (komoditas tertentu) justru menunjukkan sikap sepihak AS dengan tidak memberi kepercayaan kepada WTO. Upaya sanksi ekonomi dengan hukuman tarif sebesar 45% dari impor China akan menjadi kekhawatiran bagi kedua negara sekaligus

ekonomi global. Fenomena ini kemudian menjadi *trade war*.

Pada tahun 2015, perdagangan AS-China mencapai \$560 miliar. Tahun 2016, AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi China, dengan menguasai 19% dari total ekspor, sementara China hanya merupakan pasar ekspor terbesar ketiga untuk AS, dengan pangsa yang mencapai 10%. Perkembangan tren ekspor China yang lebih besar dibanding AS kemudian menimbulkan kesenjangan perdagangan. AS mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, yaitu mencapai \$ 367 miliar untuk tahun 2015. China lantas menikmati surplus perdagangan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Surplus China ini yang besar itu dibingkai oleh AS melalui Trump dengan memposisikan AS mengalami kerugian yang sangat besar. Jika dikomparasikan, komoditas AS kurang prestis dibanding komoditas yang berasal dari China.

Terlepas dengan retorika antagonistik terhadap China selama kampanye, penulis menilai kebijakan Trump kepada China akan terlihat pragmatis. Alasannya, Trump akan menempuh kebijakan transaksional sempit dengan mencari keuntungan ekonomi secara luas dibandingkan memperkeruh hubungan atau stabilitas dengan negara yang mengalami pertumbuhan yang ekspansif. Hal ini didukung oleh preferensi Trump dengan kalkulasi jangka pendek dan lebih transaksional. Prioritas kebijakan Trump sama seperti dengan presiden lainnya, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya dan berfokus kepada keuntungan ekonomi secara penuh. Penulis menawarkan asumsi yaitu, Trump akan lebih berhati-hati dalam menyikapi perlawanan ekonomi ke China, sehingga pilihan rasional yang mungkin ditempuh ialah *rebalancing* dibanding menawarkan paket retorik.



Sumber: Wong, 2017.

Gambar 9.
Tren Perdagangan AS-China, 2006-2016

KESIMPULAN

Dalam menjawab pertanyaan artikel ini, penulis mengajukan jawaban bahwa kebijakan Trump yang cenderung deglobalisasi dapat dilihat sebagai bentuk *economic statecraft*, yang mana perilaku proteksionis sebagai *stick* bagi negara-negara yang sekedar menikmati keuntungan AS, sementara AS mengalami kerugian mendalam. Selanjutnya, pendekatan ini menuntun kita meyakini bahwa wacana *America First* merupakan upaya penguatan kembali kejayaan AS dengan mempertimbangkan episode globalisasi yang dirasa merugikan AS. Meskipun demikian, terdapat banyak resiko yang harus dihadapi oleh AS, misalnya penguatan *power shifting*.

Terdapat tiga pokok besar diskusi tulisan ini: (1) kepemimpinan Trump menimbulkan kekhawatiran bagi berlangsungnya ekonomi-politik kawasan dan global; (2) fenomena deglobalisasi merupakan konsekuensi logis dari keterpurukan ekonomi global dan AS pasca-krisis finansial; (3) terjadi fenomena penguatan rekonfigurasi peran negara dalam proses globalisasi (3) kejenuhan Trump pada globalisasi yang cenderung

merugikan melalui pendekatan multilateral. Hal ini bisa menjadi ancaman karena seolah memberi legitimasi bagi China untuk meningkatkan kekuatan ekonomi-politik.

Tulisan ini kemudian memprediksikan bahwa kebijakan ekonomi Trump dapat berimplikasi pada status AS sebagai negara superior yang semakin terkikis. Dengan setumpuk agenda proteksionisme baru, kelompok bisnis di AS ataupun mitra utama AS akan merasa kehilangan pelindung kekuatan di masa yang akan datang, sebab mereka selama ini mendapat jaminan (*carrot*) dari bentuk kerja sama ekonomi sebelum kepemimpinan Trump. Bahkan, panggung ekonomi dunia lambat laun dibentuk oleh China—meskipun tetap mempertahankan legasi sistem yang ditanamkan AS, yaitu *liberalism rule base*. Kekuatan alternatif mulai terasa dengan terobosan wacana ekonomi regional dan global yang dilakukan oleh China. Uniknya, pertarungan Donald Trump dan Xi Jinping dapat disaksikan melalui wacana *America First* berjibaku dengan *China Dream*. Misalnya, China akan mendapatkan keuntungan di saat AS menempuh pendekatan bilateral. Hal ini didorong

dengan upaya pembangunan jalur perdagangan (*silk road*) dengan visi *One Belt One Road* dan berdirinya *Asian Infrastructure Investment* (AIIB) yang juga sebagai lawan tanding kekuatan AS dalam unit perbankan pembangunan yaitu IMF. Dengan demikian, fenomena ke depan bisa

memunculkan skenario bahwa wacana deglobalisasi yang berlangsung pada awal kepemimpinan Trump bisa berubah, yaitu apabila kebijakan Trump tidak lagi terkonsentrasi kepada *rebalancing* kekuatan China, tetapi lebih berkonsentrasi pada kawasan Amerika dan Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alder, S., Lagakos, D. & Ohanian, L., 2014. The Decline of the U.S. Rust Belt: A Macroeconomic Analysis. *Center for Quantitative Economic Research: Working Paper Series*, 14(5), 1-40.
- Armstrong, D., 1998. Globalization and the Social State. *Review of International Studies*, 24(4), 461-478.
- Bastari, G. R. & Rivai, A. N. A., 2017. *Demystifying the Mth of Cosmopolitanism: Are We Truly Living in a Borderless World?*. Depok, IPCSPI.
- Baylish, J. & Smith, S., 1998. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Bello, W., 2005. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London: Zed Books.
- Brinkman, R. L. & Brinkman, J. E., 2008. Globalization and the Nation-State: Dead or Alive. *Journal of Economic Issues*.
- Buzan, B., 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs*, 67(3), 431-451.
- Clarck, I., 1997. *Globalization and Fragmentation: International Relations in Twentieth Century*. Oxford: University of Oxford Press.
- Ferguson, N., 2005. Sinking Globalization. *Foreign Affairs*, 84(2), 64-75.
- Fransen, T. & Levin, K., 2017. *The Climate Effect of the Trump Administarion*, New York: Inter Press Service News Agency.
- Friedman, T. L., 2007. *The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Picador.
- Goodman, M. P., 2017. Troubling Start for Trump's Economic Statecraft. *CSIS: Global Economics Monthly*, 6(1).
- Held, D. & McGrew, A., 1997. The End of the Old Order? Globalization and the Prospect of World Order. *Review of International Studies*, 219-243.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. & Perraton, J., 1999. *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Ikenberry, G. J., 2011. The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America. *Foreign Affairs*, 90(3), 56-68.
- Ikenberry, G. J., 2015. Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia. *Political Science Quarterly*, 20(20).
- Keightley, M. P., Labonte, M. & Stupak, J. M., 2016. *Slow Growth in the Current U.S. Economic Expansion*, Washington DC: Congressional Research Services.
- Mann, M., 1997. Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?. *Review of International Political Economy*, 4(3), 472-496.
- Mc Lellan, D., 2005. Globalization in the 21st Century. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, No. 106, *Fundamentalism, Authority and Gobalization*.
- Menendez, Ryan, R. & Paul, 2017. *Immigration policy; National security; Political campaigns; Presidents; Border*

- patrol, Mexico Wisconsin United States-US New Jersey California Central America: Federal Information & News Dispatch, Inc..
- Michaels, J. D., 2017. Trump and the "Deep State": The Government Strikes Back. *Foreign Affairs*, 96(5), 52-56.
- Nguyen, H., 2017. Donald J. Trump and Asia: From Campaign to Government. *Asian Affairs: An American Review*, 44(4), 125-141.
- Ohmae, K., 1995. *The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order*. Harvard: Harvard Business School Press.
- Orrenius, P. M. & Zavodny, M., 2017. Creating Cohesive, Coherent Immigration Policy. *Journal on Migration and Human Security*, Vol. 5, 180-193.
- Pollack, J. D., 2017. *Donald Trump and the Future of U.S. Leadership: Some Observations on International Order, East Asia, and the Korean Peninsula*. Washington DC, The Brookings Institution.
- Prakash, A. & Hart, J. A., 1999. *Globalization and Governance*. London: Routledge.
- Sassen, S., 2003. The State and Globalization. *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies*, 5(2), 241-248.
- Scholte, J. A., 1997a. Global Capitalism and the State. *International Affairs*, 73(2), 427-452.
- Scholte, J. A., 1997b. The Globalization of World Politics. Dalam J. Baylis & S. Smith, eds. *The Globalization of World Politics: An Introduction of International Relations*, 13-30. Oxford : Oxford University Press.
- Scholte, J. A., 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. London: Macmillan Press LTD.
- Shaw, M., 1997. The State of Globalization: Towards a Theory of State Transformation. *Review of International Political Economy*, 4(3), 497-513.
- Waltz, K. N., 2000. Structural Realism after the Cold War. *International Security*, 25(1), 5-41.
- Wickett, X., 2007. *America's International Role Under Donald Trump*. London: The Royal Institute of International Affairs.
- Wong, J., 2017. Trump's Worrying Trade With China. *The Straits Times Asia Report*, Issue 2, 14-15.

Artikel Daring

- Alden, E., 2016. *The Biggest Issue That Carried Trump to Victory*. Diakses dari <http://fortune.com/2016/11/10/trump-voters-free-trade-globalization/>.
- Aljazeera, 2017. *Donald Trump: 'America first' in trade from now on*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/2017/11/donald-trump-america-trade-171110104828618.html>.
- BBC News, 2017. *BBC News*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38695593>.
- Chakraborty, B., 2017. *Paris Agreement on climate change: US withdraws as Trump calls it 'unfair'*. Diakses dari <http://www.foxnews.com/politics/2017/06/01/trump-u-s-to-withdraw-from-paris-climate-pact-calls-it-unfair-for-america.h>.
- Chandy, L. & Seidel, B., 2017. *Is Globalization's Second Wave About to Break?*. Diakses dari <https://www.brookings.edu/research/is-globalizations-second-wave-about-to-break/#cancel>.
- Doherty, C., 2016. *5 facts about Trump supporters' views of immigration*. Diakses dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/25/5-facts-about-trump-supporters-views-of-immigration/>.
- Gillis, J. & Popovich, N., 2017. *The U.S. Is the Biggest Carbon Polluter in History. It Just Walked Away From the Paris Climate Deal*. Diakses dari

<https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/01/climate/us-biggest-carbon-polluter-in-history-will-it-walk-away-from-the-paris-climate-deal.html>.

Kurtzleben, D., 2016. *Rural Voters Played A Big Part In Helping Trump Defeat Clinton*. Diakses dari

<https://www.npr.org/2016/11/14/501737150/rural-voters-played-a-big-part-in-helping-trump-defeat-clinton>.

McClelland, E., 2016. *The Rust Belt was turning red already: Donald Trump just pushed it along*. Diakses dari https://www.washingtonpost.com/po-stereverything/wp/2016/11/09/the-rust-belt-was-turning-red-already-donald-trump-just-pushed-it-along/?utm_term=.547ded51886c.

Suastha, R. D., 2016. *CNN Indonesia*. Diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20161109161737-134-171507/menakar-kebijakan-as-di-tangan-donald-trump/>.

Tyson, A. & Maniam, S., 2016. *Behind Trump's victory: Divisions by race, gender, education*. Diakses dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/>.

Walt, S. M., 2011. *Nationalism Rules*. Diakses dari <http://foreignpolicy.com/2011/07/15/nationalism-rules/>.